

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien merupakan tuntutan mendasar dalam era otonomi daerah di Indonesia. Kualitas kinerja aparatur pemerintah menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Sedarmayanti (2020), pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pejabat publik, serta kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif (Fadhila et al., 2025). Dalam konteks ini, evaluasi kinerja tidak hanya diterapkan pada unit pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tetapi juga pada unit-unit pelayanan internal yang menopang efektivitas organisasi pemerintahan secara keseluruhan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur staf pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepala daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun koordinasi administratif antarperangkat daerah. Sebagai organ inti pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah dituntut untuk beroperasi secara optimal guna memastikan kelancaran seluruh fungsi pemerintahan. Pegawai sebagai subjek yang menjalankan sistem organisasi

memiliki peranan yang substansial dalam organisasi Sekretariat Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Daerah didukung oleh unit-unit kerja pelayanan internal, salah satunya adalah Subbagian Rumah Tangga yang bertugas menyediakan sarana dan prasarana operasional perkantoran.

Gambar 1.
POSISI SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DALAM STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Sumber: Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda Kab. Bojonegoro (2026)

Gambar 1 di atas memperlihatkan bahwa Subbagian Rumah Tangga berada di bawah Bagian Umum yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran, yang meliputi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, serta dukungan kegiatan kedinasan. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilaksanakan dengan baik dan tertib untuk menjamin peralatan, sarana dan prasarana ruang kantor tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan demi kelancaran bekerja (Prastika, 2023). Kegagalan dalam mengelola sarana dan prasarana dapat mengakibatkan kekurangan, kerusakan, kerugian, serta

terhentinya pekerjaan, sehingga kinerja Subbagian Rumah Tangga sangat menentukan kelancaran aktivitas kerja aparatur dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pelayanan rumah tangga perkantoran di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya kinerja Subbagian Rumah Tangga. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan, seperti lambatnya penanganan sarana dan prasarana, ketidakmerataan distribusi fasilitas, respons terhadap keluhan yang belum optimal, serta pembagian beban kerja yang belum proporsional. Permasalahan tersebut berkaitan dengan indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas menurut teori William N. Dunn, sehingga diperlukan evaluasi kinerja secara komprehensif melalui enam indikator evaluasi.

Tabel 1.
INDIKASI PERMASALAHAN KINERJA SUBBAGIAN RUMAH
TANGGA SETDA KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Aspek Kinerja	Indikasi Permasalahan	Dampak yang Ditimbulkan
1	Kecepatan respons	Keterlambatan penanganan kerusakan sarana prasarana kantor	Terhentinya aktivitas kerja aparatur
2	Pemerataan layanan	Kurang meratanya distribusi fasilitas antar bagian di Setda	Ketimpangan kenyamanan kerja antar unit
3	Responsivitas	Belum optimalnya penanganan keluhan pegawai pengguna layanan	Ketidakpuasan pegawai sebagai pengguna internal
4	Efisiensi SDM	Pembagian beban kerja yang belum proporsional	Penumpukan pekerjaan pada sebagian staf
5	Efektivitas anggaran	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan skala prioritas.	Mendukung kelancaran pelayanan.

Sumber: Observasi awal peneliti (2026)

Permasalahan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga yang telah diatur dalam regulasi dengan kondisi kinerja yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan pendekatan partisipatori melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan kerja serta interaksi dengan pegawai pengguna layanan, ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam aspek kecepatan respons, pemerataan layanan, responsivitas, efisiensi SDM, dan efektivitas anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Subbagian Rumah Tangga belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Fenomena keterlambatan pelayanan dan belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana tersebut menjadi isu utama yang penting untuk dievaluasi karena Subbagian Rumah Tangga merupakan unit penunjang operasional pemerintahan yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas kerja aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah. Apabila pelayanan internal tidak berjalan secara cepat, merata, dan responsif, maka hal tersebut dapat menurunkan efektivitas kerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi terhadap kinerja Subbagian Rumah Tangga menjadi penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi unit tersebut telah berjalan sesuai tujuan organisasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Padahal, secara normatif, Subbagian Rumah Tangga dituntut untuk bekerja

secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu instrumen utama dalam evaluasi pemerintah daerah adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi dasar pertanggungjawaban kepala daerah terhadap kinerja pemerintahannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019. Dengan demikian, kinerja setiap unit di lingkungan Sekretariat Daerah, termasuk Subbagian Rumah Tangga, turut berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya suatu kajian yang tidak hanya menggambarkan kinerja, tetapi juga menilai sejauh mana kinerja tersebut telah sesuai dengan tujuan, standar, dan kebutuhan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan setiap unit kerja pemerintah untuk mengevaluasi capaian kinerjanya secara periodik (PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021). Penanggung jawab pembinaan Perangkat Daerah agar nilai akuntabilitas kinerja baik adalah bagian dari organisasi Sekretariat Daerah (Wahyunengseh, 2022). Oleh karena itu, evaluasi kinerja Subbagian Rumah Tangga sebagai bagian dari Sekretariat Daerah memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan internal.

Dalam konteks tersebut, teori evaluasi William N. Dunn menjadi landasan yang relevan dan kuat untuk diterapkan. Teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Normansyah & Arifin,

2020; Bagaq, 2026; Dista Yasah et al., 2025). Keenam kriteria tersebut secara komprehensif mampu menjangkau berbagai dimensi kinerja unit kerja pemerintahan, tidak terbatas pada dimensi output semata, tetapi juga mencakup distribusi manfaat, ketepatan sasaran, serta kemampuan merespons kebutuhan pengguna layanan. Penerapan teori ini dipandang tepat karena evaluasi merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kinerja, apakah kinerja tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik (Normansyah & Arifin, 2020; Rahmah & Deliarnoor, 2025). Subbagian Rumah Tangga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan dan fungsi pelayanan internal pemerintah daerah, sehingga penerapan keenam kriteria Dunn akan memungkinkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas kinerja unit ini.

Penggunaan teori evaluasi Dunn dalam menilai kinerja unit pemerintahan telah dibuktikan relevansinya melalui berbagai penelitian terdahulu. Dista Yasah et al. (2025) menggunakan teori Dunn untuk mengevaluasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan menemukan bahwa program tersebut belum merata di kalangan kelompok lansia meskipun aspek responsivitasnya dinilai baik. Sejalan dengan itu, Bagaq (2026) menerapkan keenam kriteria Dunn secara utuh dalam penelitian kualitatif mengenai pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan hasil bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara efektif, efisien, merata, dan responsif. Sementara itu, Ardiana et al. (2024) mengkaji penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BPBD Kota Bekasi menggunakan

pendekatan studi kasus dengan perspektif *good governance*, dan menyimpulkan bahwa SAKIP terbukti mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Adapun Fadhila et al. (2025) melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui pendekatan kuantitatif dengan variabel belanja daerah dan dana perimbangan, serta membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan telaah atas penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian evaluasi umumnya diterapkan pada program-program pelayanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat luar, seperti program kependudukan, pengelolaan dana desa, serta evaluasi anggaran daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI KINERJA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJOENEGORO”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan mengungkapkan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti. Menurut Creswell (2014), rumusan masalah yang baik harus mampu mengarahkan peneliti pada fokus kajian yang jelas dan terukur, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Meskipun judul penelitian telah mencerminkan topik yang dikaji, penyajian judul saja belum cukup karena berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara peneliti dan pembaca. Oleh karena itu, perumusan masalah yang baik berfungsi untuk menyamakan pemahaman antara kedua pihak sehingga tidak

terjadi kesalahpahaman dalam memaknai penelitian.

Perlu dipahami bahwa rumusan masalah memiliki kedudukan yang berbeda dari masalah itu sendiri. Masalah merujuk pada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan ilmiah yang jawabannya diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data secara mendalam (Moleong, 2017). Dengan demikian, rumusan masalah sekaligus mencerminkan fokus kajian peneliti serta menggambarkan keterkaitan antarvariabel atau fenomena yang diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah evaluasi kinerja Subbagian Rumah Tangga di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kinerja Subbagian Rumah Tangga di Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas

tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam penerapan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003). Melalui keenam kriteria evaluasi Dunn efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan penelitian ini menguji sejauh mana kerangka teori tersebut mampu menjelaskan dan mengukur kinerja unit pelayanan internal pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengaplikasikan teori yang telah ada, tetapi juga memperkaya literatur evaluasi kebijakan publik dalam konteks pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran pemerintah daerah, yang selama ini masih terbatas kajiannya, khususnya pada level Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro): Memberikan gambaran evaluatif yang

komprehensif mengenai kondisi kinerja Subbagian Rumah Tangga yang sedang berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan administrasi internal yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

- 2) Untuk Universitas Bojonegoro: Menambah khazanah penelitian terapan di bidang administrasi publik yang relevan dengan kondisi tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui kontribusi riset yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas birokrasi lokal.
- 3) Untuk Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan.
- 4) Untuk Mahasiswa dan Pembaca: Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji evaluasi kinerja unit kerja pemerintahan menggunakan teori William N. Dunn (2003), khususnya dalam konteks pelayanan administrasi internal pada Sekretariat Daerah tingkat kabupaten.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar

dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

i. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

ii. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep dan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh uraian akan digunakan sebagai acuan.

iii. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

iv. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian berupa gambaran umum Lokasi dan pembahasan yang dianalisis dengan teori yang digunakan.

v. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab

terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

